

Efektivitas Pelaksanaan Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) Di Kelurahan Tenda Kecamatan Hulonthalangi Kota Gorontalo

Saffa Salsabila Akilie¹, Jusrin Kadir², Lutfia Bakari³,
^{1,2,3} Program Studi Ilmu Administrasi Publik, Universitas Bina Taruna Gorontalo

Corresponding Author: Saffa Salsabila Akilie, e-mail: salsabilaakilie26@gmail.com

Published July: 2025

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Efektivitas Pelaksanaan Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) di Kelurahan Tenda Kecamatan Hulonthalangi Kota Gorontalo. Jenis penelitian ini adalah Deskriptif dengan pendekatan Kualitatif, Teknik pengumpulan data berupa observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil penelitian ini ditinjau terdapat beberapa permasalahan di antaranya yaitu belum maksimalnya pembaruan data penerima bantuan BPNT ada masyarakat yang sudah tidak menerima tapi namanya masih terdaftar di data penerima, kurangnya koordinasi pihak kelurahan kepada masyarakat tentang jadwal penyaluran karena keterlambatan jadwal penerima, serta ada beberapa penerima yang tidak layak menerima bantuan tersebut karena masih tergolong mampu jadi bisa dibilang belum tepat sasaran. Kesimpulannya, bahwa Efektivitas Pelaksanaan Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) di Kelurahan Tenda Kecamatan Hulonthalangi, terdapat beberapa permasalahan di antaranya yaitu belum maksimalnya pembaruan data penerima bantuan BPNT, kurangnya koordinasi sosialisasi tentang jadwal penyaluran karena masih ada keterlambatan jadwal penerima, dan penerimaan belum tepat sasaran ada beberapa masyarakat belum tercover.

Kata Kunci: Efektivitas, Program, Bantuan Pangan Non Tunai

ABSTRACT

This research aims to determine the effectiveness of the implementation of the Non-Cash Food Assistance Program (BPNT) in Tenda Village, Hulonthalangi District, Gorontalo City. The type of this research is Descriptive with a Qualitative approach, using data collection techniques such as observation, interviews, and documentation. The results of this study reveal several issues, including the lack of optimal updates to the BPNT aid recipient data, where some individuals no longer receive aid but their names are still listed in the recipient data. Additionally, there is insufficient coordination from the sub-district officials to the community regarding the distribution schedule, leading to delays in the recipients' schedule. Furthermore, there are some recipients who are not eligible to receive the aid because they are still considered capable, indicating that the program is not accurately targeted. In conclusion, the effectiveness of the implementation of the Non-Cash Food Assistance Program (BPNT) in Tenda Village, Hulonthalangi District, has several issues, including the suboptimal updating of BPNT recipient data, lack of coordination and socialization regarding the distribution schedule due to delays in the recipient schedule, and the assistance not being well-targeted as some members of the community are not covered.

Keywords: Effectiveness, Program, Non-Cash Food Assistance

© The Author(s). 2021 Open Access This article is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License, which permits use, sharing, adaptation, distribution and reproduction in any medium or format, as long as you give appropriate credit to the original author(s) and the source, provide a link to the Creative Commons licence, and indicate if changes were made. The images or other third party material in this article are included in the article's Creative Commons licence, unless indicated otherwise in a credit line to the material. To view a copy of this licence, visit <http://creativecommons.org/licenses/by/4.0>

PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara penyelenggara BPNT, Program BPNT awalnya merupakan pengganti Beras Sejahtera (Rastra) yang bermasalah. Dengan mekanisme pemberian kompensasi berupa uang tunai dan bahan pangan, penyaluran bantuan sosial ditargetkan pada tiga perkelopokan, yaitu kurang miskin, serta sangat miskin. Sejak

tahun 2017, pemerintah secara bertahap mengalihkan penyaluran bantuan sosial dari program rastra ke program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT). Langkah ini bertujuan untuk meningkatkan efektivitas distribusi bantuan agar lebih tepat sasaran serta mendukung terciptanya inklusi keuangan di masyarakat, terutama bagi kelompok kelas menengah ke bawah. Kemiskinan merupakan salah satu persoalan utama dalam pembangunan ekonomi yang perlu segera ditangani. Kondisi ini berdampak pada penurunan kualitas hidup masyarakat, menghambat pembentukan sumber daya manusia yang berkualitas, memunculkan kebutuhan akan bantuan sosial, meningkatkan angka kriminalitas, serta mengganggu ketertiban masyarakat. Oleh karena itu, pemerintah menjadikan penanggulangan kemiskinan sebagai prioritas karena dampaknya yang luas dan merugikan banyak aspek kehidupan. (Septiadi & Nursan, 2020).

Bantuan sosial (bansos) disalurkan kepada masyarakat yang menghadapi risiko sosial. Bantuan ini bisa berupa uang ataupun barang. Ketentuan mengenai pemberian bantuan sosial tercantum dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2019 tentang Pekerja Sosial, yang merupakan revisi dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial. Dalam ketentuan tersebut, bantuan sosial dijelaskan sebagai bentuk dukungan pemerintah berupa uang, barang, atau pelayanan yang diberikan kepada individu, keluarga, kelompok, atau masyarakat yang mengalami kemiskinan, ketidakmampuan, atau berada dalam situasi rentan terhadap risiko sosial. Salah satu jenis bantuan yang disalurkan pemerintah adalah Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), yang bertujuan membantu pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat kurang mampu. (Bantuan sosial merupakan bentuk dukungan yang disalurkan oleh pemerintah atau lembaga terkait untuk membantu individu atau kelompok masyarakat yang berada dalam kondisi membutuhkan. Dukungan ini dapat diberikan dalam bentuk tunai, barang, maupun layanan. Tujuan dari bantuan sosial untuk meningkatkan kesejahteraan, mengurangi kemiskinan atau memberikan bantuan dalam situasi darurat. Keluarga yang tergolong sangat miskin, miskin, dan hampir miskin menjadi sasaran program yang dicanangkan oleh pemerintah sebagai upaya perlindungan sosial guna membantu masyarakat kurang mampu mengatasi efek buruk dari kebijakan penyesuaian kompensasi. Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) merupakan program bantuan sosial dari pemerintah yang diberikan kepada penerima di setiap bulan kepada keluarga penerima manfaat melalui rekening bank. Tujuan BPNT adalah membantu mengurangi biaya belanja makanan penerima manfaat, memberikan nutrisi seimbang, menyediakan bahan pangan yang tepat, dan memberikan variasi pilihan makanan. Program ini juga diharapkan dapat menciptakan kondisi yang mendukung masyarakat dalam mengakses Pemanfaatan pelayanan keuangan yang formal di sektor bank yang mendukung percepatan suatu program inklusi keuangan. Sehingga, dalam penyaluran BPNT kepada masyarakat menjadi lebih optimal dikarenakan adanya satu nilai yang lebih tepat dalam mencapai sasaran, jumlah, waktu, dan mutu. Bantuan Pangan Non Tunai bisa memberi satu dampak baik dan buruk bagi penerimanya, tergantung pada sejumlah faktor. Salah satu dampak positifnya adalah membantu mengurangi kemiskinan serta meningkatkan kondisi ekonomi penerima. Namun, bantuan ini juga berpotensi menimbulkan dampak negatif, seperti membuat penerima menjadi terlalu tergantung pada bantuan tersebut. Akibatnya, mereka mungkin kehilangan dorongan untuk bekerja atau memulai usaha mandiri. Terdapat berbagai penilaian mengenai efektivitas dalam merencanakan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) yang ada Indonesia. Salah satu aspek yang mendapat perhatian adalah penetapan sasaran dan proses pendataannya, di mana evaluasi menunjukkan bahwa pendataan BPNT sering kali kurang berhasil dalam menentukan penerima yang tepat. Kadang-kadang, bantuan diberikan kepada pihak yang sebenarnya tidak memerlukan. Sehingga ini yang diperlukan upaya yang lebih serius dalam memastikan bantuan tersebut tepat sasaran. Beberapa penelitian juga menunjukkan bahwa BPNT memiliki dampak positif dalam mengurangi tingkat kemiskinan di daerah-daerah tertentu. Namun, efeknya berbeda-beda tergantung pada cara pelaksanaan dan kondisi setempat. Untuk benar-benar memahami efektivitas dan dampak program ini, evaluasi yang lebih komprehensif sangat dibutuhkan. (Iqbal, 2022).

Kelurahan Tenda adalah salah satu kelurahan yang berada di kota Gorontalo, kelurahan ini merupakan wilayah yang ada di pesisir sungai bone dengan total penduduk kurang lebih sekitar 5213 sebahagian besar mata pencaharian masyarakat berupa nelayan dan serabutan. Kelurahan ini adalah salah satu kelurahan yang menyalurkan bantuan sosial kepada masyarakat yang kurang mampu, jumlah penerima BPNT di kelurahan Tenda sebanyak 421 jiwa dengan bantuan BPNT tersebut berupa bahan pangan seperti beras, minyak kelapa, dan telur. Berbeda dengan program sebelumnya yang memberikan pangan secara langsung, sekarang BPNT dalam bentuk uang elektronik yang berjumlah 200 ribu rupiah perbulannya, penerimaan bantuan tersebut pertiga bulan jadi total uang yang diterima 3 bulan sekali berjumlah 600 ribu rupiah. Anggaran tersebut disalurkan oleh dinas pusat melalui kelurahan kepada penerima bantuan. Program ini diberikan pemerintah bertujuan untuk meringankan ekonomi di suatu daerah. Namun pada kenyataannya, masalah klasik selalu muncul dalam penyaluran bantuan sosial, yaitu ketidakakuratan data penerima. Pendataan yang dilakukan oleh pihak kelurahan masih kurang efektif, sehingga ada warga terdampak yang tidak menerima bantuan, sementara di sisi lain ada yang tidak berhak justru mendapatkan bantuan. Beberapa laporan yang diterima menunjukkan bahwa sistem data penerima belum sepenuhnya terintegrasi.

Selain itu, untuk menghindari penerima fiktif, pembaruan data oleh aparat kelurahan juga belum dilaksanakan secara menyeluruh. Selain itu, koordinasi antara pihak kelurahan dengan masyarakat dalam pelaksanaan program BPNT masih kurang optimal, sehingga tidak mengherankan jika program tersebut belum sepenuhnya tepat sasaran. Di samping itu, penyaluran Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) kerap kali tidak tepat sasaran, sebab masih banyak masyarakat kurang mampu yang seharusnya memperoleh bantuan justru tidak terdaftar sebagai penerima. Masalah ini umumnya disebabkan oleh penggunaan data penerima yang sudah usang dan belum diperbarui atau diverifikasi kembali, sehingga mengakibatkan ketidaksesuaian dalam distribusi bantuan. Oleh karena itu, diperlukan evaluasi terhadap program ini untuk menilai tingkat efektivitasnya serta sejauh mana tujuan yang telah ditetapkan dapat tercapai.

TINJAUAN PUSTAKA

Konsep Administrasi

Administrasi adalah upaya untuk mengendalikan dan menggerakkan suatu organisasi sehingga organisasi tersebut dapat berfungsi dengan baik dan bergerak menuju pencapaian tujuan yang telah ditetapkan oleh pimpinan. Administrasi merupakan sebuah proses yang ditemukan hampir di semua jenis organisasi yang produktif, baik yang dimiliki oleh pemerintah maupun swasta, baik di bidang sipil maupun militer, serta dalam skala besar maupun kecil. (Astuti et al., 2023).

Menurut Handayani, administrasi dalam pengertian sempit berasal dari kata "administratie" dalam bahasa Belanda, yang mencakup kegiatan-kegiatan teknis seperti pencatatan, surat-menyurat, pembukuan sederhana, pengetikan, pengelolaan agenda, dan lain-lain. Dengan demikian, tata usaha merupakan salah satu bagian dari administrasi dalam arti yang lebih luas.

Menurut Dwight Waldo, administrasi dapat dipahami sebagai suatu bentuk kerja sama antarindividu yang dilakukan secara kolektif dan didasarkan pada tingkat rasionalitas yang tinggi. Sementara itu, menurut Dimock & Dimock, administrasi merupakan suatu disiplin ilmu yang berfokus pada bagaimana keinginan masyarakat diimplementasikan oleh pemerintah melalui berbagai metode dan strategi tertentu. Sedangkan Sondang P. Siagian mengartikan administrasi sebagai keseluruhan proses kerja sama antara dua orang atau lebih yang didasari oleh rasionalitas tertentu demi mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. (Marliani, 2022).

Dalam buku "Administrasi Publik" oleh DTMR Panjaitan & PDK Pardede (2021), Secara garis besar, administrasi publik membahas cara mengelola organisasi-organisasi dalam sektor publik. Berbeda dengan ilmu manajemen yang fokus pada pengelolaan

organisasi swasta, administrasi publik berfokus pada organisasi pemerintahan seperti kementerian, dinas, dan instansi dari level kecamatan hingga nasional. (Panjaitan & Pardede, 2021).

Dalam buku Pengantar Administrasi Publik karya Sitna H. (Melawat, 2022). administrasi publik digambarkan sebagai jembatan penghubung antara pemerintah dan masyarakat. Konsep ini membantu memahami dinamika hubungan tersebut sekaligus meningkatkan akuntabilitas dalam pelaksanaan kebijakan publik agar lebih efektif dan efisien. Pengembangan administrasi publik harus mempertimbangkan faktor lingkungan, terutama lingkungan eksternal, karena sangat memengaruhi keberhasilan dan eksistensi bidang yang dikelola. Istilah administrasi publik sendiri terdiri dari dua kata, yakni administrasi, yang berasal dari bahasa Yunani: *ad* (intensif) dan *ministrare* (melayani), serta kata publik yang merujuk pada masyarakat umum.

Kebijakan Publik

Kebijakan Publik sebagai Proses Dinamis Menurut Tangkilisan, kebijakan publik adalah proses dinamis yang melibatkan interaksi antara berbagai aktor, jaringan, dan institusi dalam lingkungan yang kompleks. Kebijakan publik tidak hanya berfokus pada keputusan akhir, tetapi juga pada proses pembentukan, implementasi, dan evaluasi kebijakan (Tangkilisan, 2020).

Kebijakan Publik dalam konteks Perubahan Iklim menurut Mulyadi (2015) menekankan pentingnya kebijakan publik yang responsif terhadap perubahan iklim dan isu-isu lingkungan lainnya. Kebijakan publik harus mempertimbangkan dampak jangka panjang terhadap lingkungan dan mendorong transisi menuju ekonomi yang lebih berkelanjutan (Yati & Wirjatmi Trilestari, 2021).

Implementasi Publik

Menurut Agus Dwiyanto, implementasi kebijakan merupakan tahapan krusial dalam proses kebijakan publik, karena pada tahap inilah sebuah program dijalankan untuk mewujudkan hasil atau tujuan yang telah dirumuskan. (Irfan, 2021).

Menurut Purwanto (2020), implementasi kebijakan adalah proses pelaksanaan ide, prinsip, atau penafsiran dari kebijakan yang telah dirumuskan sebelumnya oleh pembuat kebijakan (Purwanto, 2020).

Menurut Winarno (2021), pelaksanaan kebijakan merupakan rangkaian suatu tindakan yang dilaksanakan oleh individu atau perkumpulan, baik dari sektor pemerintah maupun swasta, guna merealisasikan tujuan yang telah ditentukan dalam keputusan kebijakan sebelumnya.

Bantuan Sosial

Menurut gagasan dari Peraturan Menteri Dalam Negeri No 32 Tahun 2011, bantuan sosial merupakan bentuk pemberian dari pemerintah daerah kepada perorangan, keluarga, atau kelompok masyarakat dalam bentuk uang tunai atau bahan kebutuhan pokok, yang diberikan secara selektif. Pusat Penyuluhan Sosial merupakan sebuah program yang menyalurkan dana atau bantuan barang dengan tujuan mengurangi angka kemiskinan melalui pemerataan kesejahteraan serta memberikan perlindungan bagi rumah tangga dari fluktuasi pendapatan. Bantuan ini diarahkan untuk mencukupi kebutuhan dasar hidup yang layak, memenuhi standar gizi minimum, serta mendukung rumah tangga dalam menghadapi berbagai risiko yang mungkin terjadi.

Menurut persepsi dari Peraturan Menteri Keuangan No254/PMK.05/2015 yang menyatakan Belanja Bantuan Sosial pada Kementerian Negara/Lembaga, bantuan sosial merupakan bentuk pengeluaran pemerintah dalam bentuk transfer uang, barang kebutuhan pokok, atau jasa yang diberikan kepada individu atau kelompok masyarakat yang tergolong miskin atau kurang mampu, dengan tujuan untuk melindungi mereka dari potensi risiko sosial serta mendukung peningkatan kondisi ekonomi mereka. (Iqbal, 2022).

- Jenis-jenis Bantuan Sosial

Beragam jenis dan jumlah bantuan sosial disalurkan dengan tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Berikut ini adalah beberapa macam bantuan sosial yang ada:

- a. PKH merupakan program bantuan sosial bersyarat yang ditujukan kepada keluarga kurang mampu, terutama ibu hamil dan anak-anak, agar mereka dapat mengakses layanan kesehatan dan pendidikan yang tersedia. (Kemensos, 2019).
- b. BST adalah bantuan uang tunai yang diberikan kepada keluarga kurang mampu, miskin, atau rentan terdampak pandemi dengan besaran sebesar Rp600.000 per keluarga per bulan (Badan Pusat Statistik, 2020).
- c. Program PBI memberikan subsidi iuran jaminan kesehatan kepada masyarakat berpenghasilan rendah atau yang tidak mampu, dengan iuran tersebut dibayarkan ke BPJS Kesehatan setiap bulan.
- d. Kartu Prakerja merupakan program peningkatan keterampilan kerja dan kewirausahaan yang menyediakan bantuan biaya bagi pencari kerja, pekerja yang terkena PHK, atau mereka yang ingin meningkatkan kompetensi, termasuk pelaku usaha mikro dan kecil.

- Prinsip Bansos 6T

6T terdiri atas (PKH Kemensos, 2019):

- a. Tepat sasaran berarti keluarga penerima bantuan sosial memenuhi syarat dan kriteria yang telah ditetapkan untuk menjadi penerima program bansos.
- b. Tepat kualitas berarti bantuan sosial yang diberikan bertujuan untuk meningkatkan kapasitas keluarga penerima agar bisa mandiri atau mampu keluar dari ketergantungan bantuan (tergraduasi).
- c. Tepat jumlah berarti jumlah keluarga yang menerima bantuan sudah sesuai dengan kebutuhan yang ada.
- d. Tepat harga berarti jumlah bantuan yang diterima oleh keluarga sesuai dengan ketentuan dan standar harga yang berlaku.
- e. Tepat waktu berarti penyaluran bantuan sosial dilakukan sesuai dengan jadwal dan peraturan yang telah ditetapkan.
- f. Tepat administrasi dapat diartikan sebagai kepatuhan dalam proses administrasi mulai dari pendaftaran, penyaluran, pelaporan, pertanggungjawaban, hingga seluruh kegiatan administratif lainnya.

Proses Pendataan dan Penyaluran Bantuan

1. Pendataan Penerima Bantuan

Proses pendataan penerima sebagai berikut:

1. Basis data diambil dari data Kemensos yang sudah terdaftar sebagai penerima bantuan (DTKS) atau terdaftar di aplikasi SIKS-NG: <https://siks.kemensos.go.id/>
2. Data dikirim ke Dinas Sosial Kab/Kota dan ditembuskan ke Dinsos Provinsi.
3. Selanjutnya dilakukan proses pengolahan, pemadanan, verifikasi validasi data dan musyawarah:
 - a. Pengelolaan dan pencocokan data terkait bantuan sosial dan subsidi dari pemerintah.
 - b. Pencocokan Nomor Induk Kependudukan (NIK) dan alamat dengan data yang ada di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tingkat Kabupaten/Kota.
 - c. Proses verifikasi dan validasi Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) yang dilakukan oleh petugas pendata atau pekerja sosial masyarakat (PSM) yang bertugas di Pusat Kesejahteraan Sosial (Puskesmas) di tingkat desa.
 - d. Pelaksanaan musyawarah di tingkat kelurahan atau desa yang dipimpin oleh kepala desa atau lurah, untuk menetapkan usulan penambahan atau penghapusan data yang kemudian akan disampaikan kepada Pusat Data dan Informasi Kementerian Sosial.

4. Dinas Sosial Kab/Kota mengajukan bantuan sesuai pintu bantuan bansos :
 - a. Mengajukan ke Pusdatin Kemensos RI melalui SIKS-NG Untuk Bansos Tunai atau Bansos Sembako.
 - b. Mengajukan ke Dinsos Provinsi Jabar melalui Dinsos Kab/Kota untuk Bansos Provinsi.
5. Data Keluarga Miskin Penerima Manfaat (KPM) yang telah disetujui akan diberikan datanya ke PT Pos.
6. PT Pos melakukan proses pembersihan dan pemetaan data Keluarga Penerima Manfaat (KPM) mulai dari tingkat RT hingga Kecamatan.
7. Data yang belum lengkap akan dikembalikan untuk dilengkapi, kemudian diserahkan kepada Disperindag atau Bulog untuk bantuan non tunai, serta Dinas Sosial untuk bantuan tunai, agar persiapan pengadaan bantuan sosial dapat dilakukan.

(DTKS : Data Terpadu Kesejahteraan Sosial)

2. Proses Penyaluran Bantuan

Dalam konteks (BPNT) dilaksanakan secara bertahap dan diatur berdasarkan Kementerian Sosial No. 20 Tahun 2019 mengenai penyaluran BPNT. Daerah-daerah yang terpilih sebagai pilot project harus memenuhi sejumlah persyaratan, termasuk kesiapan infrastruktur pembayaran, telekomunikasi, bahan pangan, serta usaha eceran yang ada, serta dukungan dari pemerintah daerah. Beberapa indikator perlu diuji coba, seperti mekanisme pelaksanaan dan kesiapan teknologi.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan teknik pengumpulan data berupa observasi yakni pengamatan langsung,, wawancara, dan dokumentasi sesuai dengan tujuan penelitian. Tujuannya untuk membuat data tersebut mudah dipahami dan hasilnya akurat, peneliti menggunakan sumber-sumber tinjauan pustaka yang bersumber dari berbagai jurnal yang telah dipublikasi. Melalui pendekatan ini diharapkan informasi yang valid mengenai efektivitas pelaksanaan program bantuan pangan non tunai (BPNT).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Uraian penelitian ini difokuskan pada kajian efektivitas pelaksanaan Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) di wilayah Kelurahan Tenda, Kecamatan Hulonthalangi, yang ditinjau melalui tiga indikator utama, yaitu proses pembaruan data penerima, mekanisme koordinasi, serta tingkat ketepatan sasaran distribusi bantuan.

1. Pembaruan merupakan suatu bentuk perubahan, ide, atau gagasan yang mendorong seseorang untuk bekerja dan berkarya dengan cara yang berbeda dan lebih baik dibanding sebelumnya, bahkan bisa menciptakan dimensi kinerja baru. Proses pembaruan ini biasanya disertai dengan munculnya tantangan, sebab setiap perubahan menempatkan individu dalam kondisi yang berbeda sehingga menuntut adanya penyesuaian diri (Peter Drucker, Manajemen Sumber Daya Manusia). Sementara itu, perbaruan juga merujuk pada tindakan untuk memperoleh data terbaru mengenai penerima manfaat dalam program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT). Berdasarkan temuan peneliti dapat diketahui bahwa pembaruan data sudah dilakukan oleh aparat desa terutama koodinator BPNT. Mekanisme pembaruan data selalu diperhatikan, pendataan itu dilakukan terlebih dahulu oleh Ketua RT/RW dengan mengusulkan warga yang layak menerima berdasarkan kondisi sosial ekonomi mereka. Namun, proses pembaruan masih berjalan lambat sehingga masih ada orang yang tidak layak menerima namun tetap mendapatkan bantuan, dan ada beberapa masyarakat mengusulkan nama yang berhak menerima tetapi belum terealisasi, karena ada beberapa aparat desa yang hanya mengusulkan kerabat terdekatnya.

2. Dalam sebuah kelompok koordinasi sangat diperlukan untuk mengkoordinasikan kegiatan kepada anggota kelompok. Dengan adanya penyampaian informasi, komunikasi yang jelas, sebuah kegiatan akan terarah dengan baik. Menurut (George R. Terry, 2020) Koordinasi merupakan upaya yang terorganisir dan selaras untuk memastikan ketersediaan sumber daya dalam jumlah dan waktu yang tepat, sekaligus mengarahkan pelaksanaan agar tercipta tindakan yang serasi dan harmonis demi mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Secara fungsional, koordinasi adalah kegiatan yang dilakukan untuk mengurangi dampak negatif spesialisasi dan mengefektifkan pembagian kerja. Koordinasi juga merupakan syarat mutlak untuk menjamin agar semua kegiatan kerja dalam organisasi dapat berjalan dengan harmonis dan efisien. Berdasarkan hasil penelitian, kepala kelurahan mengingatkan agar selalu melakukan koordinasi langsung dengan masyarakat mencegah terjadinya kesalahan, tetapi dari keluhan masyarakat ada beberapa permasalahan yang terjadi yaitu keterlambatan jadwal penerima atau toko penyedia hanya menyediakan satu dua bahan pangan saja, seharusnya berbeda-beda.
3. Dilihat dari ketepatan tujuan dari sebuah program yang dilaksanakan adalah seberapa jauh program terlaksanakan apakah peserta program tepat atau belum. Dalam ketepatan sasaran ditujukan fokusnya ke masyarakat yang benar-benar membutuhkan bantuan. Tepat sasaran sangat penting dalam menentukan berhasil tidaknya program tersebut. Oleh karena itu keberhasilan sangat berpengaruh. Menurut P. Siagian dalam bukunya menyebutkan bahwa efektivitas kerja dapat dilihat dari beberapa segi kriteria, salah satunya adalah Ketepatan sasaran kerja mencakup aspek perencanaan dan pelaksanaan program yang sesuai dengan target yang ingin dicapai oleh lembaga. Dari hasil penelitian, diketahui bahwa kepala kelurahan telah berusaha secara maksimal untuk memastikan bahwa bantuan tersebut tepat sasaran dan diterima oleh masyarakat yang berhak. Proses verifikasi data dilakukan secara berkala, dan masukan dari RT/RW serta tokoh masyarakat juga kami libatkan untuk memastikan keakuratan data. Namun masih ada masyarakat yang mungkin belum tercover, terutama yang baru saja terdampak secara ekonomi atau belum terdata dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS). Diharapkan aparat desa lebih sering turun langsung ke lapangan guna memantau dan memastikan bahwa bantuan diberikan kepada masyarakat yang memang berhak menerimanya.

KESIMPULAN

Secara keseluruhan dapat disimpulkan bahwa Efektivitas Pelaksanaan Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) di Kelurahan Tenda Kecamatan Hulonthalangi, terdapat beberapa permasalahan di antaranya yaitu belum maksimalnya pembaruan data penerima bantuan BPNT ada masyarakat yang sudah tidak menerima tapi namanya masih terdaftar di data penerima, kurangnya koordinasi pihak kelurahan kepada masyarakat tentang jadwal penyaluran karena keterlambatan jadwal penerima.

Disarankan bahwa aparat desa harus terjun langsung kelapangan untuk mendata masyarakat yang benar-benar menerima bantuan BPNT ini, RT/RW juga harus dilibatkan untuk memastikan keakuratan data dan bantuan ini tepat sasaran. Oleh sebab itu perlu koordinasi antara aparat kelurahan dan RT/RW agar usulan masyarakat bisa diterima dan yang belum mendapatkan bantuan BPNT bisa di usulkan lagi dalam Bantuan jenis lain supaya masyarakat yang tergolong tidak mampu bisa merasakan bantuan dari Pemerintah.

DAFTAR PUSTAKA

Ahmad M., Agus H., (2023). Teori Administrasi Publik Pengantar. In Administrasi Negara Publik, PT. Sonpedia Publishing Indonesia: Jambi.

- Ariyani. (2019). Jurnal Analisis Efektivitas Kontribusi Komunitas Masyarakat Tanpa Riba Kota Medan. *Jurnal Manajemen*. 2, (2): 209.
- Astuti, M., Saputri, R., & Noviani, D. (2023). Pengertian, Tujuan dan Ruang Lingkup Administrasi dan Supervisi Pendidikan. *Jurnal Studi Islam Indonesia (JSII)*, 1, (1): 167-176.
- Hasanah, S. W., & Setiawati, B. (2022). Efektivitas Penerapan Praktek Pengelolaan Keuangan Desa Berbasis Sistem Keuangan Desaa (SISKEUDES) di Desa Solan Kecamatan Jaro Kabupaten Tabalong. *Jurnal Mahasiswa Administrasi Publik Dan Administrasi Bisnis*, 5, (1): 215-228.
- Iqbal, K. M. (2022). Sistem Pendukung Pengambilan Keputusan Pemberian Bantuan Sosial Menggunakan Metode Topsis Berbasis Web. *Fakultas Teknik dan Ilmu Komputer Universitas Ilmu Komputer: Bandung*
- Irfan, M. (2021). Implementasi Kebijakan Administrasi Kependudukan Di Kota Bima (Studi Kasus di Dinas Catatan Sipil dan Kependudukan Kota Bima). *Ilmu Administrasi Negara*. 18, (2): 21-39.
- Marliani, L., & Si, M. (2018). Definisi Administrasi Dalam Berbagai Sudut Pandang. *Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Galuh*. 5, (4): 17-21.
- Melawat, S. H. (2022). Pengantar Administrasi Publik. *Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al-Banjary Banjarmasin: Banjarmasin*.
- Panjaitan, D. T. M. R., & Pardede, D. K. (2021). *Administrasi Publik*. CV. Eureka Media Aksara: Purbalingga.
- Pasaribu, M. H. (2021). Implementasi Sebuah Program Berbasis Riset Aksi Dalam Meningkatkan Kualitas Program. *Education Achievement: Journal of Science and Research*. 2, (1): 38-46.
- Purwanto, E. A. (2020). Implementasi Kebijakan Publik. *Administrasi Negara Publik*. 5, (5): 26.
- Safrudin, R., Zulfamanna, Kustati, M., & Sepriyanti, N. (2023). Penelitian Kualitatif. *Journal Of Social Science Research*. 3, (2): 1-15.
- Septiadi, D., & Nursan, M. (2020). Pengentasan Kemiskinan Indonesia: Analisis Indikator Makroekonomi Dan Kebijakan Pertanian. *Jurnal Hexagro*. 4, (1): 1-14.
- Tangkilisan, H. (2020). Implementasi Kebijakan Publik. *Ilmu Administrasi Publik, Pemerintahan, Dan Politik*. 3, (1): 17.
- Yati, I., & Wirjatmi Trilestari, E. (2021). Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan Program Penyediaan Air Minum Dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (Pamsimas) Di Kabupaten Purwakarta (Studi Kasus Di Desa Cikadu Kecamatan Cibatu). *Jurnal Ilmu Administrasi*. 12, (2): 1-15.
- Yeremias T. Keban. (2018). Enam dimensi strategis Administrasi publik: konsep, teori dan isu. *Gava Media: Yogyakarta*.
- Winarno. (2021). *Budi Kebijakan Publik: Teori dan Proses*. Media Pressindo: Yogyakarta.
- Kementerian Sosial Republik Indonesia. (2022). *Laporan Tahunan Program Bantuan Sosial 2021*. Kementerian Sosial: Jakarta.
- Kementerian Sosial Republik Indonesia. (2023). *Laporan Tahunan Program Bantuan Sosial 2022*. Kementerian Sosial: Jakarta.
- Dinas Sosial Provinsi DKI Jakarta. (2022). *Laporan Pelaksanaan Bantuan Sosial Tahun 2021*. Dinas Sosial DKI Jakarta: Jakarta.